BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap perubahan sistem informasi dan komunikasi *online* saat ini melaju dengan sangat cepat dan meroket. Hal ini disadari sebagai perwujudan pergerakan terhadap penyampaian informasi secara aktual dan cepat. Media *online* merupakan media yang terhubung melalui internet, sehingga pada akhirnya muncul divisi baru yang dikatakan sebagai *Cyber PR*. Singkatnya adalah inisiatif PR atau *Public Relation* yang mmenggunakan media internet sebagai sarana publikasinya. Inisiatif PR ini di Indonesia lebih dikenal dengan istilah *Cyber Public Relations*. Namun peniliti menggunakan istilah yang lebih singkat yaitu *Cyber PR* atau E-PR, E-PR adalah :

E adalah *elektronik*, ‘e’ dalam E-PR sama halnya seperti ‘e’ sebelum kata *mail* atau *commerce* yang mengacu pada media elektronik internet. **P adalah *publik***, publik di sini mengacu pada masyarakat, dimana melalui media internet suatu organisasi dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah dan cepat, atau sebaliknya masyarakat yang menjangkau suatu organisasi atau perusaaan. **R adalah *relations***, maksudnya adalah hubungan yang harus dipupuk antara suatu organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Hal itu merupakan kunci kepercayaan suatu organisasi untuk membangun *relations* antara organisasi atau perusahaan dengan *public audiens*, dan itu adalah kunci suatu kesuksesan di internet. Menariknya media internet, dapat menciptakan hubungan yang bersifat

face-to-face atau *one-to-one* dapat dibangun dalam tempo yang cepat karena sifat internet yang interaktif. Oleh karena itu internet adalah media pembangun relations yang paling ampuh dan cepat serta luas.

Menurut *Institute of Public Relations* dalam kamus IPR, Nov'1987 Humas adalah:

> "Keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dan rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya." (Frank Jefkins, *Public Relations*. 1998 : 8).

Sesuai dengan upaya yang terencana dan berkesinambungan itu mengartikan bahwa seorang humas telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang berkelanjutan dan teratur. Adanya suatu rencana yang matang dan teratur tersebut dikarenakan untuk menciptakan dan memelihara niat baik serta saling pengertian antara organisasi dengan khalayaknya (masyarakat). Untuk menciptakan saling pengertian dengan publiknya, humas membutuhkan suatu media komunikasi modern yang bisa menjangkau khalayak yang luas, salah satunya yaitu internet.

Internet menuntut para pelaku PR untuk memanfaatkan media *online* tersebut, karena hal itu memang tidak dapat dihindari, apalagi jika perusahaan atau organisasi sudah memiliki situs web (*website*) atau bahkan sudah menggunakan *e-mail*. Jika keberadaan suatu organisasi sudah diekspos melalui internet, maka jangan tanggung-tangung, karena hal itu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Oleh karena itu, E-PR tidak dapat dielakkan. Mau tidak mau suatu organisasi atau perusahaan harus serius

melakukan inisiatif E-PR. Dengan terjun ke internet, maka organisasi atau perusahaan secara otomatis menjadi bagian dari suatu media E-PR.

Istilah *Cyber* PR atau *Electronic* PR (E-PR) digunakan untuk kegiatan *Public Relations* (PR) yang menggunakan media internet sebagai media publikasinya. Saat ini keberadaan media *online* tidak dapat dihindarkan lagi, karena media *online* internet dan komunikasi teknologi merupakan media yang membuat selruh dunia tersambung, sehingga dapat mendatangkan dampak sekaligus manfaat yang tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu PR memanfatkan keberadaan internet sebagai penyebaran informasi, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi publik pada perusahaan atau organisasi, karena PR menyajikan berbagai informasi di media *online*-nya tersebut. Baik atau buruknya penilaian publik pada perusahaan atau organisasi bisa saja terjadi, yang tentu saja sangat bergantung pada kualitas informasi yang disajikan pada media *online* tersebut.

Saat ini banyak praktisi PR berbicara atas nama perusahaan telah mempertimbangkan penggunaan internet sebagai salah satu strategi komunikasi PR. Mereka tidak punya pilihan lain dan menjadikan internet sebagai bagian dari budaya perusahaan. Melalui internet ini juga setiap individu dapat menjadi penerbit atau melakukan kampanye untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini teknologi telah mengubah pola komunikasi PR yang sebelumnya masih konvensional seperti komunikasi yang bersifat *face-to-face,* surat, rapat dan diskusi. Semua itu telah mereka tinggalkan dengan pola yang lebih aktual setelah lahirnya internet.

Berbicara mengenai internet, saat ini juga banyak PR dalam suatu perusahaan membuat media yang diterbitkan mingguan dengan jangkauan luas untuk mengirim pesan secara langsung kepada konsumen dan menanggapi keluhan konsumen, dimana sejumlah perusahaan atau organisasi membuka situs *Worl Wide Web (www).* Penggunaan internet oleh para profesional merupakan cikal bakal dari perkembangan teknologi internet. Membayangkan internet sebagai jaringan komputer saja tidak dapat dibenarkan, karena jaringan komputer hanyalah medium yang membawa informasi. Daya guna internet terletak pada informasi itu sendiri, bukan pada jaringan komputer, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan sumber daya informasi yang berorientasi kepada manusia. Internet memberikan kesempatan pada pengguna di seluruh dunia untuk menggunakan sumber daya informasi tersebut secara bersama-sama. Adapun manfaat lain dari internet adalah sebagai berikut, internet dan intranet membawa perspektif dalam bentuk jaringan teknologi yang memungkinkan informasi dalam bentuk jaringan teknologi, dimana setiap orang dapat mengakses informasi kapan saja untuk memenuhi kebutuhannya.

Organisasi atau perusahaan yang mengadopsi internet akan mengalami perkembangan pesat di tengah-tengah masyarakat yang semakin heterogen dan dapat mencapai khalayak sasaran yang jumlahnya lebih besar. Selain itu, melalui internet *annual report* (laporan tahunan) yang dibuat divisi PR perusahaan juga dapat dimuat dalam situs/web perusahaan atau perusahaan jasa PR di internet, sehingga tidak perlu lagi dikirim dengan cara konvensional, via pos dan lainnya. Saat ini dunia PR sudah memasuki masa keemasan, karena teknologi internet

telah membawa praktisi PR mampu mencapai publik sasaran secara langsung, tanpa intervensi dari pihak-pihak lain, seperti redaksi atau wartawan di media massa, yang biasanya bertindak sebagai penjaga gawang dan melakukan penyensoran terhadap pesan informasi PR bagi khalayak (masyarakat).

Teknologi internet saat ini memang tengah melaju sangat agresif. Daya jangkaunya yang mendunia tanpa batas ruang dan waktu telah menjadi media aktifitas sosial global yang kemudian membentuk ruang-ruang publik baru skala dunia, dan menimbulkan juga perubahan yang agresif pada tatanan infrastruktur sosial. Peran individu bukan lagi objek pihak lain (media dan institusi), tetapi telah berubah menjadi subjek yang mempengaruhi opini publik. Dengan pola distribusi *one to many*, biaya operasional yang rendah, *mobile* serta kemandirian menentukan *agenda setting*, membuat peran mereka menjadi sangat kuat (*powerfull*).

Dalam model masyarakat baru seperti itu, maka peran humas pun ikut berubah. Tantangannya jauh lebih besar dan lebih kompleks, sehingga dibutuhkan strategi *public relations* yang berbeda dibanding era-era sebelumnya. Oleh karena itu, keterampilan para humas pun harus ditingkatkan agar tidak kontra produktif menghadapi efek perubahan. Untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dan lebih kompleks, maka seorang *public relations* dituntut untuk lebih meningkatkan strateginya dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang mana seorang PR harus mampu menyesuaikan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi tersebut sesuai dengan perkembangannya.

Perkembangan sistem teknologi benar-benar menjadikan internet sebagai bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini, karena internet secara lengkap menyediakan kebutuhan akan informasi, berita, hiburan, serta ilmu pengetahuan. Dengan internet tidak ada lagi batasan antara ruang dan waktu dalam berkomunikasi dengan berbagai orang di berbagai belahan dunia. Internet mampu menghubungkan pihak yang satu dengan pihak lainnya secara bersamaan dengan prinsip komunikasi dua arah.

Yosal Iriantara menyatakan bahwa :

> "Dengan adanya berbagai kelebihan, kehadiran internet kerap disebut sebagai media baru. Pada saat ini media baru merupakan istilah yang dipergunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa mutakhir yang berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi." (Iriantara, Media relations. 2005 : 118).

Memang benar kebutuhan berbagai jenis organisasi akan informasi bukan hal yang baru, karena sejak dulu hingga sekarang penanganan suatu sistem informasi dilakukan melalui tujuh tahap, yaitu :

1. Pengumpulan data.
2. Klasifikasi data.
3. Pengolahan data supaya berubah bentuk.
4. Interpretasi informasi.
5. Penyimpanan informasi
6. Penyampaian informasi atau transmisi kepada pengguna, dan
7. Penggunaan informasi untuk kepentingan manajemen organisasi. (Iriantara, Media relations. 2005 : 118).

Sesuatu yang baru adalah proses penanganan yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan dan terobosan teknologi, terutama dengan

menggunakan komputer dan sarana lain yang bermuatan teknologi tinggi. Hal tersebut menyebabkan lahirnya masyarakat informasional, yang juga sebagai akibat pemanfaatan perkembangan dan terobosan teknologi informasi, baik dilhat dari aneka ragam perangkat kerasnya maupun dilihat dari sudut dukungan perangkat lunak yang memungkinkan aplikasinya semakin beraneka ragam. (Sondang, Sistem Informasi Manajemen. 2003 : 2).

Selain itu, Yosal Iriantara juga menegaskan bahwa :

> "Perubahan teknologi dan perkembangan internet dapat dikatakan sebagai peluang karena bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak tersedia namun bisa dimanfaatkan oleh organisasi". (Iriantara, Media relations. 2005 : 125).

Berdasarkan penegasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan menggunakan internet, organisasi dapat menginformasikan profil perusahaan atau kegiatan *public relations* dalam waktu singkat dan tepat. Adapun biaya yang digunakan dalam penggunaan internet relatif murah, meskipun di satu sisi memerlukan biaya tinggi. Keberadaan internet sebagai media komunikasi kini merepresentasikan salah satu dari berbagai alat penting pada pekerjaan *Public Relations*. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Holtz, bahwan:

> "Internet menjadi salah satu alat yang paling berarti pada kegiatan *Public Relations* (PR). Dengan menggunakan internet untuk mendapatkan keuntugan terbaik, maka dibutuhkan pemikiran strategis tentang tujuan mengaplikasikan "*Net*" untuk melakukan usaha komunikasi. Profesional komunikasi perlu memahami media apa yang terbaik dan bagaimana jika media tersebut tidak bermanfaat dengan baik, sehingga *Public Relations* (PR) perlu memahami karakter publik *online*, dampak dari jaringan lingkungan (*network environtment*), harapan dari interaktivitas serta keinginan untuk bicara dan didengarkan". (Holtz, *PR on the Net*. 2002 : xi).

Dari hasil wawancara sebelum penelitian, peneliti mengetahui pula bahwa adanya kegiatan *cyber PR* yang dilakukan sejak tahun 2001 oleh Humas Setda Kabupaten Karawang adalah untuk menghadapi perubahan teknologi dan perkembangan internet saat ini, salah satunya yaitu dalam menyebar luaskan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh Humas Setda Kabupaten Karawang, karena Pemerintah Kabupaten Karawang menyadari bahwa dewasa ini tidak ada ada satupun kebijakan pemerintah yang dapat luput dari sorotan dan kritikan masyarakat, karena akses publik terhadap semua jenis informasi sudah sangat terbuka dan beragam. Sehingga pemerintah dan para pengambil keputusan dalam organisasi apapun saat ini ditantang untuk dapat merumuskan tanda-tanda jaman seperti yang diisyaratkan oleh gelombang demokratisasi dan transparansi.

Dalam era demokratisasi dan transparansi terutama dalam hal pelayanan informasi publik mengharuskan adanya komitmen dan konsistensi yang tinggi dari seluruh aparat pemerintah, termasuk aparat Hubungan Masyarakat (Humas) yang dapat memahami hakekat misi pemerintahan sebagai aparat pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*Empowerment*) dan pembangunan (*Development*). Oleh karena itu keberedaan *cyber* PR di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, selain untuk memanfaatkan perkembangan terknologi internet, hal tersebut juga dilakukan sebagai cara untuk menyatukan komitmen dan konsistensi seluruh aparat pemerintah.

Perlu kita ketahui Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Karawang melakukan reorganisasi Kelembagaan Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk tersebut, maka dibuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas Daerah dan 11 Lembaga Teknis Daerah (5 Badan, 4 Kantor, Inspektorat dan RSUD). Selain lembaga-lembaga tersebut, dibentuk pula kecamatan dan kelurahan, yang terdiri dari : Kecamatan sebanyak 30 kecamatan, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan. Kelurahan sebanyak 12 kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Daerah Kabupaten Karawang.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Struktur kelembagaan Kabupaten Karawang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas Daerah dan 11 Lembaga Teknis Daerah (5 Badan, 4 Kantor, Inspektorat dan RSUD). Dalam hal ini, maka diperlukan strategi humas untuk lebih memperkenalkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah kepada masyarakat, yang mana seorang PR dalam menjalankan strateginya memerlukan suatu media sebagai alat publikasi. Salah satunya yaitu dengan melibatkan kegiatan Humas di Pemerintah Kabupaten Karawang melalui media

online (*cyber PR* / *E-PR*). Selain itu, kegitan Humas tersebut juga merupakan cara untuk menunjukan eksistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada masyarakat.

Menurut peneliti, eksistensi merupakan sebuah filsafat yang memandang segala gejala berpangkal pada keberadaan (eksistensi) dan titik sentralnya adalah manusia. Sehingga untuk mengetahui bagaimana eksistensi dari suatu perusahaan atau lembaga diperlukan suatu cara untuk menunjukkan eksistensinya. Dengan adanya eksistensi dari suatu perusahaan atau lembaga, menjamin masyarakat untuk ikut serta memberikan perhatiannya melalui aspirasi atau partisipasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Seperti yang peneliti ketahui bahwa Humas Setda Kabupaten Karawang menyampaikan informasi mengenai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui *website* (www.karawangkab.go.id), hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemberitaan tersebut kepada masyarakat. Adapun pada dasarnya kegiatan yang dilakukan Humas melalui media *website* itu merupakan cara untuk menunjukkan eksistensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui *website* yang dapat di akses oleh siapa dan kapan saja. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah, dimana saat ini informasi telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, karena informasi memiliki peran yang sangat penting dan menentukan untuk mencapai suatu tujuan.

Gordon B. Davis mengemukakan bahwa:

> "Informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai serta mempunyai/mengandung nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan, baik ketika sedang berlangsung maupun untuk proses masa yang depan." (May Rudy, 2005 : 16).

Informasi yang diterima merupakan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Informasi ini pada dasarnya bersumber dari data yang sudah diolah sehingga mempunyai nilai tambah bagi penerimanya. Pentingnya informasi tentang sumber daya manusia terdapat dalam suatu organisasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan organisasional. Dikatakan tantangan, karena tanpa informasi tersebut suatu organisasi tidak mungkin terjadi atau sulit untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memanfaatkan sumberdaya manusia semaksimal mungkin. Oleh karena itu keterbukaan informasi melalui kemudahan komunikasi dan transportasi akibat pesatnya perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam hal ini berupaya mengembangan kegiatan humasnya melalui media *online* untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat guna memberikan pelayanan informasi publik.

Banyak diakui bahwa keberhasilan suatu program pemerintah antara lain juga sangat ditentukan oleh berhasil atau tidaknya aparat pelayanan pemerintah melalui Humas untuk berperan secara aktif dalam memberi pelayanan informasi kepada publik secara luas. Peran Humas pemerintah saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat berkaitan dengan sering terjadinya kesimpangsiuran informasi karena banyaknya sumber informasi dari berbagai media, yang akhirnya justru

mengundang kebingungan publik. Sorotan masyarakat terhadap peran Humas pemerintah yang terkesan belum optimal dalam melakukan tugasnya itu sangat wajar, karena banyaknya kendala internal yang dihadapi oleh Humas untuk melakukan tugas dan fungsinya termasuk dalam reposisinya guna mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang ada.

Berbicara mengenai sorotan masyarakat, selain peran humas yang dibicarakan, pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling hangat dalam sektor publik dewasa ini dan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Hal itu pun sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, dimana dengan menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berupaya untuk melakukan berbagai upaya pembenahan atau reformasi untuk menciptakan suatu "*good governance*". Salah satu yang diharapkan adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui *cyber PR* sebagai konsep *e-government*. (Hasil Wawancara Peneliti dengan Salah Seorang Staf Bagian Pemerintahan).

Electronic government atau disebut juga *e-government* / *e-govt* atau di bahasa Indonesiakan menjadi pemerintahan secara elektronis merupakan fenomena relatif

baru yang muncul sebagai bagian dari upaya untuk mereformasi bidang pemerintahan. Fenomena tersebut muncul di negara-negara maju sebagai dampak dari perkembangan pesat bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pada awal tahun 1990-an, di Amerika timbul perdebatan tentang sejauhmana implikasi perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi tersebut terhadap bidang pemerintahan. Perdebatan tersebut dalam situs *World Bank* disebut dengan debat "*Information Superhigways*". Perdebatan tersebut kemudian melebar ke arah perwujudan "*information society*" dan *e-government* merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan masyarakat informasi tersebut. (Edah Jubaedah, dalam Wacana Kinerja. 2003 : 29).

Konsep *e-government* berkembang dengan di latar belakangi oleh dua hal, yang perama yaitu kondisi pemerintahan di berbagai Negara, termasuk Negara maju sekalipun yang masih dipandang sebagai organisasi yang tidak efisien dan tidak efektif, sehingga perlu di transformasi. Kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi yang cukup untuk mentransformasi pemerintahan dalam rangka menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, *World Bank* menegaskan bahwa *e-government* merupakan suatu cara untuk mentransformasi pemerintahan agar berpusat kepada masyarakat (*citizen centered*), adapun teknologi hanyalah merupakan alat untuk melakukan transformasi tersebut. (Edah Jubaedah, dalam Wacana Kinerja. 2003 : 30).

Setelah itu, khususnya di Negara-negara maju memiliki inisiatif untuk melakukan transformasi di bidang pemerintahannya dengan menerapkan konsep *e-government*, termasuk Negara-negara berkembang yang kinerja

pemerintahannya lebih buruk daripada Negara-negara maju ikut berinisiatif untuk menerapkan konsep tersebut. Salah satunya yaitu Negara Indonesia yang telah memiliki inisiatif untuk mewujudkan pemerintahan secara elektronis (*e-government*), bahkan beberapa pemerintah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota telah memulai untuk mengembangkan dan menerapkannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi memperlihatkan dari 390 instansi pemerintah tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota, sudah terdapat 99 instansi yang telah mengembangkan *website*-nya (Kristiadi, dalam Seminar Sehari Elektronik *Government*. 2002), bahkan ada pemerintahan tingkat kabupaten yang sudah menerapkan pelayanan secara *online*.

Mengingat bahwa menurut *World Bank*, teknologi komunikasi dan informasi memang dapat memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat suatu Negara (2002). Tetapi perlu diingat juga bahwa *e-government* bukan merupakan jalan pintas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghemat anggaran Negara atau menciptakan pemerintahah yang efisien dan bersih. Penerapan konsep *e-government* apabila tidak didukung oleh kesiapan yang matang dan menyeluruh akan menjadi suatu hal yang beresiko dan bahkan akan menjadi suatu pemborosan, karena konsep *e-government* bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya manusia yang sangat besar, sehingga harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif *e-*

government tersebut diperlukan atau tidak untuk diimplementasikan. (http://worldbank.org).

Menurut pendapat Heeks yang dikutif dalam jurnal wacana kinerja Edah Jubaedah :

> "Beberapa rumusan tentang konsep *e-government* sangat menekankan pada adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan". (Heks, 1998 : 1). Misalnya saja Conrad (dalam SANKRI, LAN : 2002) menyebutkan bahwa :
> *e-government* merupakan suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengakapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. (Conrad, dalam SANKRI, LAN : 2002). (Edah Jubaedah, 2003 : 31)

Selain itu, Sperecher (dalam Moon, 2002) memberikan dua pengertian dari konsep ini, yaitu *e-government* dalam pengertian sempit dan pengertian sacara luas. Secara sempit *e-government* dapat diartikan sebagai produksi dan pemberian pelayanan pemerintah melalui aplikasi teknologi informasi, sedangkan secara luas *e-government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk lebih menyederhanakan dan meningkatkan transaksi antara pemerintah dengan actor lainnya seperti masyarakat, kalangan bisnis ataupun lembaga pemerintah lainnya. (Moon, 2002 vol. 62).

Menggunakan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi semata, di dalam proses pemerintahan belum berarti bahwa konsep *e-government* telah diterapkan, karena dengan kehadiran benda tersebut belum tentu dapat mengubah kinerja pemerintah. Memfokuskan diri pada teknologi dalam pengembangan *e-government* adalah sebuah langkah yang keliru, sehingga perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah merupakan instrumen untuk terciptanya sebuah transformasi peran pemerintah, dari yang bersifat birokrasi menjadi sebuah "lembaga" yang

berorientasi proses untuk melayani “pelanggannya”, yang mana dalam hal ini adalah masyarakat, komunitas bisnis (industri), dan para *stakeholder* lainnya.

Adapun suatu Negara memutuskan untuk mengimplementasikan *e-government* kerena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan akan memberikan sejumlah manfaat seperti : meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memberikan informasi melalui internet, karena dengan internet dapat memberikan efisiensi waktu dan dapat menjangkau sumber daya manusia yang sangat besar baik kepada masyarakat dan komunitas Negara lainnya, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, serta menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, suatu pemerintahan diharapkan dapat menerapkan sistem *e-government* agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan terutama mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menurut Hidayat, 2006 : 45, penerapan *e-government* menjanjikan setidaknya tiga perubahan dasar, yaitu :

1. Proses otomatisasi : mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, *processing*, *output*, dan mengirimkan informasi.
2. Proses informasi : mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi tersebut, misalnya : mendukung alur proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan implementasi.

3. Proses transpormasi : membuat ICT baru untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi. Contohnya adalah membuat metode baru dalam pelayanan publik. (Hidayat, 2006 : 45).

Apa yang telah diuraikan di atas, peneliti berharap agar suatu pemerintahan dapat menunjukkan eksistensinya, salah satunya yaitu dengan menerapkan *Cyber PR*. Hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman (globalisasi) yang ditandai dengan berkembangnya teknologi *online* yaitu internet, dimana hal itu merupakan realitas kehidupan yang tidak mungkin dihindari. Globalisasi menjadikan dunia tidak lagi dibatasi secara tegas berdasarkan wilayah teritorial, globalisasi memungkinkan manusia secara mudah untuk melakukan kegiatan di setiap Negara di dunia ini, terutama dalam kegiatan untuk memperoleh informasi.

Saat ini telah lahir masyarakat informasional yang sangat mementingkan informasi, sehingga seorang *public relations* dituntut untuk lebih meningkatkan strateginya dalam pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk menciptakan hubungan sinergis antara pemerintah dengan *stakeholder*-nya, dan membangun interaksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti masalah penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut **"Bagaimana Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya?"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana **Manfaat** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya?
2. Bagaimana **Efisiensi** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya?
3. Bagaimana **Partisipasi** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya?
4. Bagaimana **Transparansi** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya?
5. Bagaimana **Manajemen Perubahan** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya?
6. Bagaimana **Eksistensi** *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data kemudian menganalisa, serta mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui **Manfaat** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
2. Untuk Mengetahui **Efisiensi** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
3. Untuk Mengetahui **Partisipasi** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
4. Untuk Mengetahui **Transparansi** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

5. Untuk Mengetahui **Manajemen Perubahan** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
6. Untuk Mengetahui **Eksistensi** dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya, dan dibidang *Public Relations* pada khususnya yaitu mengenai Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Peneliti

   Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh selama studi secara teori, serta sebagai suatu pelajaran dan pengalaman mengenai masalah penelitian yaitu Eksistensi *Cyber PR* sebagai *E-Government*.

b. Universitas

Penelitian ini berguna untuk mahasiswa Universitas Komputer Indonesia secara umum, dan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi secara khusus (konsentrasi Humas). Serta sebagai literatur terutama untuk peneliti pada kajian yang sama.

c. Perusahaan / Lembaga (Pemerintah Kabupaten Karawang)

Bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau evaluasi khususnya tentang Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

1.5 Kerangka Pemikirin

1.5.1 Kerangka Pemikirin Teoritis

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai eksistensi yang dikaitkan dengan manajemen perusahaan yang dikenal *balanced scorecard*, *Balanced Scorecard* merupakan konsep manajemen yang diperkenalkan Robert Kaplan tahun 1992, sebagai perkembangan sebagai salah satu alat pengukuran performa perusahaan. Maka dalam *e-Government*, Booz Allen dan Hamilton dalam satu studinya bersama Berstelment Foundation mengenalkan apa yang disebut *balanced e-Government scorecard* sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan *e-Government*. Menurut peneliti, eksistensi

merupakan sebuah filsafat yang memandang segala gejala berpangkal pada keberadaan (eksistensi) dan titik sentralnya adalah manusia.

Terdapat lima dimensi dalam *balanced e-Government scorecard* yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih detil. Dimana kelima dimensi tersebut peneliti jadikan sebagai sub fokus dari eksistensi, yaitu : **manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi,** dan **manajemen perubahan** (Stiftung, 2001) dalam (Indrajit, 2005 : 43). Berikut adalah penjelasan mengenai sub fokus dari eksistensi:

- **Manfaat**

  Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994 : 858), kata manfaat diartikan sebagai “guna, faedah, laba, untung”. Sehingga manfaat berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah “guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal mempraktikkan atau hasil kerja menerapkan.

- **Efisiensi**

  Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

  Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987 : 3) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang sebenarnya”.

Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP. Hasibuan (1984 : 233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah:

> "Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan."

- **Partisipasi**

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al*. (1999 : 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007 : 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Sedangkan Mikkelsen (1999 : 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar / para ahli yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat)

secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991 : 154-155) sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

- **Transparansi**

Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan *performance* serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat.

Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan.

Transparansi mempunyai karakteristik:

a. Adanya tujuan yang telah ditetapkan.
b. Penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan.
c. Mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi.
d. Mengembangkan standard organisasi dan operasional secara ekonomis.

- **Manajemen Perubahan**

Perubahan merupakan keniscayaan bagi individu, organisasi, dan masyarakat, seperti perubahan teknologi, perubahan nilai dan perilaku, perubahan tujuan dan kebutuhan, perubahan ketersediaan sumber daya, perubahan hukum, perubahan kontrol politik pemerintah" (Heffron, 1968 : 152).

Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis untuk menghadapi perubahan, baik dari perspektif organisasi maupun pada

tataran individu. Untuk perubahan organisasi, kita bisa mendefinisikan perubahan manajemen sebagai aktivitas yang dilakukan dalam :

1. Mendefinisikan dan menanamkan nilai-nilai, sikap, norma dan perilaku baru di dalam sebuah organisasi yang mendukung cara-cara baru dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan.
2. Membangun konsensus di antara para pelanggan dan pemangku kepentingan (*staekholders*) mengenai perubahan-perubahan spesifik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengab lebih baik.
3. Perencanaan, pengujian, dan pelaksanaan seluruh aspek transisi dari satu struktur organisasi atau proses bisnis ke yang lain" (GAO, 1998) Untuk Organisasi. Tuntutan perubahan kini menjadi hal yang konstan dan segera terjadi.

Menurut Champy dan Nohria, ada tiga pendorong utama yang mendorong perubahan organisasi berjalan lebih cepat dari sebelumnya sebagai berikut: teknologi, pemerintah dan Globalisasi (Champy dan Nohria, 1996).

1.5.2 Kerangka Pemikirin Konseptual

Pada kerangka konseptual ini peneliti akan mengaplikasikan sub-fokus / indikator yang diangkat untuk mengukur variabel / fokus pada masalah penelitian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya adalah menunjukkan bagaimana keberadaan *cyber PR* sebagai *e-government* di mata masyarakat. Eksistensi *cyber PR* sebagai *e-government* ini memiliki beberapa subfokus yaitu: **manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi,** dan **manajemen perubahan** (Stiftung, 2001). Adapun pengaplikasiannya adalah sebagai berikut:

   A. Manfaat dai *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya. Manfaat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh / merasakan layanan tersebut, hal itu dapat ditentukan dari:

   - **Keuntungan** yang diperoleh dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
   - **Hasil kerja** yang dilakukan pada *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

   B. Efisiensi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan, efisiensi tersebut dapat terwujud jika disertai dengan :

- **Kemudahan** yang tersedia lengkap pada *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
- **Perencanaan** yang baik dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
- **Realisasi** dari humas Setda Kabupaten Karawang tentang *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

C. Partisipasi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya. Partisipasi berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang tersedia dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan, hal itu dapat ditentukan dari kriteria berikut ini :

- **Keikutsertaan** masyarakat pada *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
- **Potensi** yang diberikan dari adanya *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

- **Solusi** humas Setda Kabupaten Karawang dalam menghadapi tanggapan negatif tentang *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
- **Keterlibatan** masyarakat dalam *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

D. Transparansi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya. Dalam hal ini apakah pemerintah mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transpransi antara lain :

- **Prinsip** humas Setda Kabupaten Karawang pada *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
- **Keterbukaan** informasi dalam *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

E. Manajemen Perubahan dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya. Hal ini terkait dengan proses implementasi, apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dari manajemen perubahan antara lain :

- **Pendekatan** humas Setda Kabupaten Karawang tentang *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.
- **Perubahan** yang dilakukan humas Setda Kabupaten Karawang dalam layanan informasi melalui *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

1.6 Pertanyaan Penelitian

Adapun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam penelitian, yang menjurus pada masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

A. Manfaat

1) Apa saja **keuntungan** dari *cyber PR* bagi staf pemerintah daerah kabupaten Karawang?
2) Apa saja **keuntungan** dari *cyber PR* bagi masyarakat?
3) Apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya *cyber PR*?
4) Apa saja **hasil kerja** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang dari *cyber PR*?

B. Efisiensi

1) Apa saja **kemudahan** yang dapat diperoleh dari adanya *cyber PR*?
2) Apakah **perencanaan** pada keseluruhan aspek pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia sudah maksimal?

3) Bagaimana **rencana** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang dalam pengelolaan *cyber PR*?
4) Bagaimana humas setda kabupaten karawang **merealisasikan** *cyber PR* kepada masyarakat?

C. Partisipasi

1) Bagaimana **keikutsertaan** masyarakat dalam kegiatan untuk memperoleh informasi melalui *website*?
2) Apa saja **potensi** dari masyarakat dalam *website* pemerintah daerah kabupaten Karawang?
3) Apa saja **solusi** dari humas setda kabupaten Karawang dalam mengatasi pendapat masyarakat mengenai *website*?
4) Bagaimana humas setda kabupaten Karawang mengatasi permasalahan tersebut (**pelaksanaan** sebagai solusi untuk mengatasi pendapat masyarakat mengenai *website*)?
5) Bagaimana **keterlibatan** masyarakat dalam proses evaluasi perubahan dari *website* pemerintah daerah kabupaten Karawang?
6) Berapa banyak jumlah pengunjung *website* pemerintah daerah kabupaten Karawang perhari, perminggu, perbulan, dan jumlah secara keseluruhan?

D. Transparansi

1) Apa **prinsip** dari pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat?
2) Bagaimana **keterbukaan** pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan informasi mengenai *performance*-nya kepada masyarakat?

E. Manajemen Perubahan

1) Bagaimana **pendekatan** yang dilakukan oleh Humas Setda Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat?
2) Bagaimana humas setda kabupaten Karawang melakukan **perubahan** dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat?

1.7 Subjek dan Informan Penelitian

1.7.1 Subjek Penelitian

Subyek pada penelitian ini disebut juga sebagai populasi. Populasi menurut Jalaludin Rakhmat adalah kumpulan objek penelitian (Rakhmat, 2002:78). Sugiyono menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005 : 57).

Peneliti memilih Humas Setda Kabupaten Karawang sebagai subyek penelitian mengenai Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya. Berikut ini adalah daftar nama-nama staf atau karyawan di bagian Humas Setda Kabupaten Karawang sebagai rincian populasi dalam penelitian ini, dimana peneliti akan memilih beberapa orang staf untuk dijadikan sebagai informan penelitian :

Tabel 1.1

Subjek Penelitian

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KET
1	Ir. Teny Juliantini, MM NIP: 19630704 198903 2 005	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Humas	
2	Dra. Yuti Surtini, MM NIP: 19610412 199601 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Dokumentasi	
3	Drs. Ii Wahyudin NIP: 19620630 199201 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Pemberitaan	
4	Ade Kurnia, S. Kom NIP: 19680206 199003 1 004	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi	
5	Siti Nurbaeti NIP: 19631112 198803 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	
6	Kurnia Setiawan, ST NIP: 19810822 200501 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	
7	Oktaf Hariaji, ST NIP: 19791031 200501 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	
8	Iwan Gunawan NIP: 19640318 199101 1 006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
9	Irwan Setiawan NIP: 19640818 199202 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
10	Mohamad jaelani, S. Ag NIP: 19730707 200901 1 002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
11	Lilis Ratna, S. Sos NIP: 19820624 200902 2 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
12	Suminta NIP: 19570811 197706 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
13	Asep Yayat Ruchyat	Pengatur	Pelaksana	

	NIP: 19790731 199803 1 003	(II/c)		
14	Puspita Rahayu, A. md NIP: 19850127 201001 2 009	Pengatur (II/c)	Pelaksana	
15	Akhmad Fauji NIP: 19800212 200501 1 011	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
16	Ida Nurhamidah NIP: 19680708 200701 2 008	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana	Sturada
17	Deden Solihin NIP: 19820320 200901 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana	
18	Hendri M Yusup NIP: 19820108 201001 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana	
19	Romy Maryanto	-	Kontrak Kerja	
20	Heni Juwita	-	Kontrak Kerja	Sturada
21	Rusdi Juhana	-	Kontrak Kerja	Sturada
22	Ciming	-	Kontrak Kerja	Sturada

Sumber : Arsip Profil Lembaga Humas, 2011

1.7.2 Informan Penelitian

Adapun informan pada penelian ini disebut juga sebagai sampel. Sampel dari penelitian ini adalah ditentukan melalui suatu teknik yang diharapkan dapat memenuhi kriteria respoden yang dibutuhkan yakni menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah :

> "Pemilihan sampel *purposive* atau bertujuan, kadang-kadang disebut sebagai *judgement sampling*, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu" (Moleong, 2000 : 25).

Peneliti akan memilih sampel untuk penelitian mengenai Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya, namun sebagai sampel peneliti mengambil beberapa orang dari staf Humas Setda Kabupaten Karawang yang dapat dirincikan pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Informan Penelitian

No.	Jabatan	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi	Ade Kurniawan	Laki-laki
2.	Pelaksana / Staf Humas Setda Kabupaten Karawang, Bagian Data dan Sistem Informasi	Lilis Ratna	Perempuan
3.	Pelaksana / Staf Humas Setda Kabupaten Karawang, Bagian Pemberitaan	Mohamad Jaelani	Laki-laki
4.	Pelaksana / Staf Humas Setda Kabupaten Karawang, Bagian Dokumentasi	Hendri M. Yusup	Laki-laki

Sumber : Analisis Peneliti, 2011

1.7.3 *Key* Informan Penelitian

Peneliti menentukan *key* informan sebagai informan pembanding dalam memperoleh informasi penelitian tentang Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya, rincian *key* informan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3

***Key* Informan Penelitian**

No.	Jabatan	Nama	Jenis Kelamin
1.	Wartawan Media Cetak	Heddy Yusuf	Laki-laki
2.	Staf Kecamatan Teluk Jambe Timur, Desa Sukaluyu	Iskandar	Laki-laki
3.	Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)	Romy Andika Laksono	Laki-laki
4.	Penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan	Arief Kurnia	Laki-laki

Sumber : Analisis Peneliti, 2011

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *deskriptif*. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti dalam melakukan usulan penelitian secara langsung di lapangan. Pengertian kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* adalah :

> "pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagian instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*"(Sugiyono, 2005 : 1).

Dalam hal ini peneliti akan meneliti pada kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yaitu mengenai Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya, namun peneliti tidak menjadi instrument karena

peneliti berada di luar kegiatan mereka. Adapun hasil penelitian menekankan pada makna dari responden yang telah ditentukan.

Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Hal ini sejalan dengan Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi.

> "Metode *deskriptif*, yaitu dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat". (Rakhmat, 2002 : 22).

1.9 Uji Reliabilitas Data

Dalam hal reliabilitas, Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa:

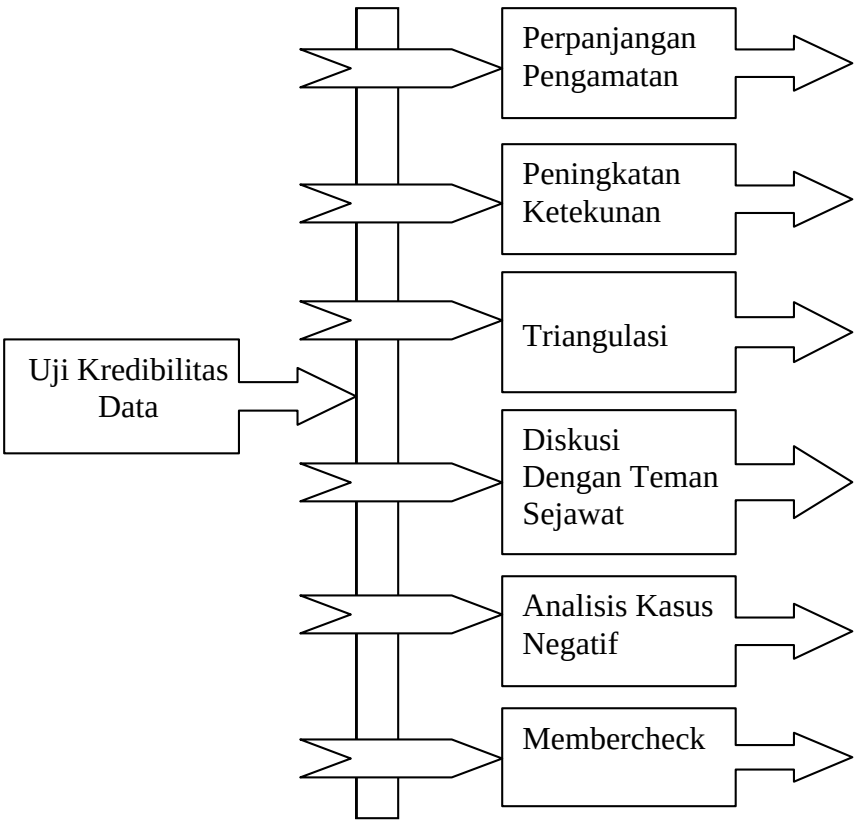
> *"Reliability is often defined as the consistency and stability of data or findings. From a positivistic perspective, reliability typically is considered to be synonymous with the consistency of data produced by observations made by different researchers (e.g interrater reliability), by the same researchers at different times (e.g test retest), or by splitting a data set in two parts (split-half)".*(Reliabilitas seringkali didefinisikan sebagai konsistensi dan stabilitas dari kata atau temuan. Dari perspektif positif, reliabilitas secara khusus dapat dipertimbangkan menjadi bersinonim dengan konsistensi data yang dihasilkan dengan observasi yang dibuat oleh para peneliti yang berbeda *(e.g interrater reliability),* oleh para peneliti yang sama pada waktu berbeda *(e.g test retest),* atau dengan pemisahan satu set data kedalam dua bagian).

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan bergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang.

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data ditunjukkan pada gambar 1.1. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck.*

Gambar 1.1
Uji Kredibilitas Data Dalam Penelitian Kualitatif



Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2008 : 270

Berikut ini penjelasan dari gambar di atas :

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

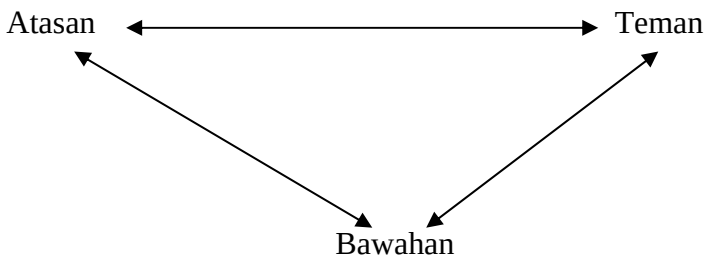
> "*Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures*." (Triangulasi adalah uji validitas kualitatif. Menilai kecukupan data menurut pemusatan berbagai sumber data atau berbagai pengumpulan data itu dengan memeriksa prosedur).(William Wiersma, 1986).

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat

1) Triangulasi Sumber : untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.2

Triangulasi Sumber Data

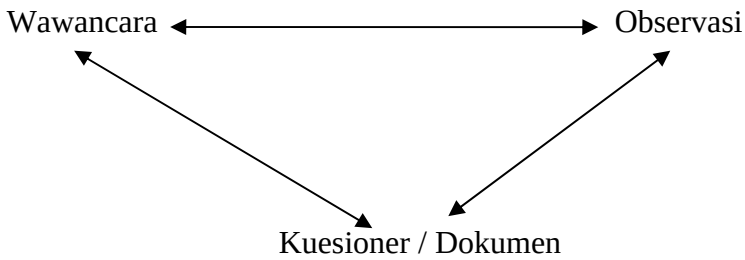


Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2008 : 273

2) Triangulasi Teknik Pengumpulan Data : untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.3

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



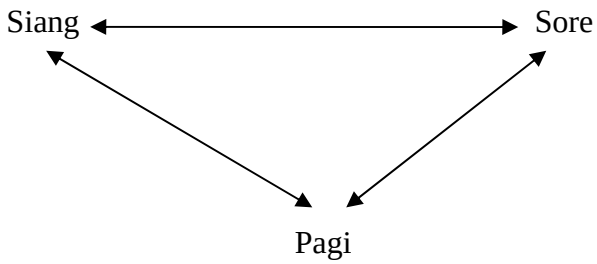
Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2008 : 273

3) Triangulasi Waktu Pengumpulan Data : waktu merupakan sesuatu yang dpat mempengaruhi kredibilitas data, artinya dalam melakukan wawancara, observasi atau teknik lain pada

suatu penelitian sebaiknya menentukan waktu terlebih dahulu. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.4

Triangulasi Waktu Pengumpulan Data



Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2008 : 274

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Maksud dari bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

f. Mengadakan *Membercheck.*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data dan informan.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu :

1. *Interview* / Wawancara Mendalam

> "Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam"(Subana dalam Riduwan 2000:29).

Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak terkait dalam penelitian ini yakni beberapa staf humas setda kabupaten Karawang (komisioner) dan responden lainnya sebagai pembanding yakni beberapa kriteria masyarakat. Dengan mengadakan tanya jawab/*interview* penulis dapat mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dibahas oleh penulis, sehingga penulis mendapatkan informasi langsung berupa data-data yang sebenarnya dan secara mendalam.

Wawancara dilakukan sebagaimana kondisi yang akan terjadi di lapangan, sehingga sifat wawancara tidak terstruktur. Mengingat peneliti ingin menanyakan kegiatan yang bersifat penemuan, peneliti tertarik untuk berhubungan langsung dengan beberapa responden, dan peneliti ingin agar responden memberikan penjelasan secara detail sesuai dengan persepsinya, mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi atau keadaan tertentu.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa :

> "Observasi merupakan suatu proses ynag kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan."

3. *Study* Pustaka.

> "Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia diperpustakaan" (Supranto dalam Ruslan, 2004 :31).

Teknik lain yaitu usaha untuk mendapatkan informasi dengan cara menelaah referensi yang sesuai dengan penelitian, seperti mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berasal dari dokumen yang berhubungan dengan perusahaan yang diteliti.

4. Dokumentasi

Pada kamus umum bahasa Indonesia, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu.

5. *Internet Searching*

Pencarian melalui situs inrternet *(Internet Searching*), merupakan proses dimana peneliti menemukan informasi-informasi yang mendukung kelengkapan data dan terdapat kaitan dengan penelitian melalui media *on-line.*

1.11 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam menganalisa data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu.

Tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (reduksi data) yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat. (Sugiyono, 2005:92).

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk di diinterprestasikan. Di samping itu data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1.12 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.12.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan keterangan sebagai berikut:

Jl. Jenderal. A. Yani No. 1 Karawang. Telp : (0267) 429800, 429801, 429802, 429803. Fax: (0267) 411923. Website: www.karawangkab.go.id.

1.12.2 Waktu Penelitian

Peneliti melakukan beberapa persiapan sebelum meneliti ke lapangan hingga persiapan untuk sidang komprehensif dan sidang sarjana semuanya dilakukan selama 6 bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Juli 2011, sedangkan persiapan peneliti untuk seminar usulan penelitian dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Maret, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.4 Jadwal Penelitian berikut ini :

Tabel 1.4

Jadwal Penelitian

NO	URAIAN	Bulan																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
1	**Persiapan**																												
	Pengajuan Judul																												
	ACC Judul																												
	Persetujuan Pembimbing Universitas																												
2	**Pelaksanaan**																												
	Draf BAB I & Bimbingan																												
	Seminar Usulan Penelitian																												
	Draf BAB II & Bimbingan																												
	Draf BAB III & Bimbingan																												
3	**Penelitian Lapangan**																												
	Wawancara																												
4	**Pengolahan Data**																												
	Draf BAB IV & Bimbingan																												
	Draf BAB V & Bimbingan																												
5	**Bimbingan Keseluruhan**																												
6	**Sidang Skripsi**																												

Sumber : Catatan Peneliti, 2011.

1.13 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai latar belakang penelitian, paragraf ini sering disebut dengan motivator atau pendorong dilakukannya penelitian. Di bagian pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan praktis dan teoritis, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, subjek dan informan penelitian, *key* informan, metode penelitian, uji reliabilitas data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan tentang komunikasi yang terdiri dari definisi komunikasi, proses komunikasi yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder, konteks-konteks komunikasi, tinjauan tentang komunikasi organisasi yang terdiri dari hakikat dan definisi organisasi, hakikat dan definisi komunikasi organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, penggolongan komunikasi dalam organisasi, tinjauan tentang *public relatioans* yang terdiri dari definisi *public relatioans*, ruang lingkup *public relatioans*, fungsi *public relatioans*, tujuan *public relatioans*,

khalayak *public relatioans*, kegiatan *public relatioans* yaitu *internal public relatioans* dan *external public relatioans*, tinjauan tentang *cyber PR* / *elektronik public relations* yang terdiri dari definisi *elektronik public relations*, manfaat *elektronik public relations*, tinjauan tentang eksistensi yang terdiri dari definisi eksistensi, tinjauan tentang *e-government* yang terdiri dari definisi *e-government*, bentuk implementasi *e-government*, perubahan dasar pada penerapan *e-government*, tinjauan tentang internet sebagai media komunikasi yang terdiri dari hakikat dan definisi internet, keunggulan media internet, tinjauan tentang informasi yang terdiri dari definisi informasi, ciri-ciri informasi, serta tinjauan tentang masyarakat yang terdiri dari definisi masyarakat, unsur-unsur masyarakat, dan kriteria masyarakat yang baik.

BAB III : OBJEK PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, khususnya keadaan objek yang berisikan mengenai tinjauan tentang pemerintah daerah kabupaten Karawang yang terdiri dari sejarah kabupaten Karawang, visi dan misi pemerintah kabupaten Karawang, logo dan arti lambang kabupaten Karawang, struktur perusahaan / instansi pemerintah kabupaten Karawang, *job description* pemerintah kabupaten Karawang, tinjauan tentang humas setda kabupaten Karawang yang terdiri dari sejarah humas setda

kabupaten Karawang, visi dan misi humas setda kabupaten karawang, struktur divisi humas pemerintah kabupaten Karawang, dan susunan organisasi humas setda kabupaten Karawang, tinjauan tentang *cyber* PR terdiri dari sejarah *cyber* PR, tinjauan tentang *e-government*, serta tinjauan tentang subyek penelitian terdiri dari komunitas, jenis kelamin, usia dan pendidikan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang meliputi identitas informan (responden), data yang diperoleh peneliti, dan data hasil penelitian yang diperoleh dideskripsikan, hal ini untuk menjawab rumusan masalah dan identifikasi yang telah dirumuskan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan rangkuman kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yakni dengan cara melihat indikasi dan kecederungan yang muncul, kemudian merumuskannya menjadi suatu kesimpulan. Kesimpulan ini pun berdasarkan penelitian tentang Wawancara (*Interview*).